

BAB IV

ALASAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE MELANJUTKAN KEBIJAKAN WAR ON DRUG

Pada bab ini akan dipaparkan alasan mengapa Presiden Duterte tetap melanjutkan kebijakan War on Drug nya meski mendapat kritik dan ancaman dari banyak pihak, khususnya aktif internasional untuk menghentikan kebijakan tersebut. Serta menjawab kenapa pemberantas narkoba menjadi prioritas utama masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Penulis menjawab rumusan masalah diatas dengan teori pilihan rasional dari Mas'ood dan Waltz, pilihan rasional mengutamakan kepentingan negaranya dalam memutuskan kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Teori ini mensyaratkan negara yang monolit, Filipina dengan sosok Duterte dapat disebut sebagai negara monolit. Penulis juga menggunakan teori Kedaulatan, yang mana teori ini menjelaskan tentang kekuasaan tertinggi berada dalam negara itu sendiri untuk mengatur internal sovereignty dan external sovereignty nya. Selain itu, Kedaulatan merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Tanpa ada kedaulatan, suatu wilayah tidak dapat dikatakan sebuah negara yang diakui secara internasional.

Kebijakan War on Drug Presiden Duterte menimbulkan pro-kontra di dunia internasional. Duterte mendapat dukungan besar dari masyarakat Filipino sebagai pemimpin mereka, namun di lain hal, pihak internasional memberikan kecaman untuk segera menghentikan perang terhadap narkoba di negaranya. Dihadapi oleh dua pilihan untuk tetap melanjutkan atau menghentikan kebijakan War on Drug nya

karena kritik dari internasional, Duterte tetap memilih untuk melanjutkan kebijakannya yang kontroversial ini karena dua alasan. Pertama, karena memberantas narkoba menjadi prioritas utama Duterte selama dirinya menjadi presiden Filipina. Kedua, karena kebijakan War on Drug ini terbukti efektif menurunkan tingkat peredaran narkoba di Filipina.

A. Masalah Narkoba yang telah mengakar mengancam Kedaulatan Negara Filipina

Selama bertahun-tahun, Filipina menjadi negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Setiap harinya, CCTV selalu merekam tindakan kriminal yang dilakukan oleh penjahat terhadap orang tua, anak muda, khususnya perempuan. Berita stasiun TV lokal sering memberitakan tindakan kriminal yang tertangkap di jalanan ataupun tempat umum melalui kamera CCTV. Tindakan kriminal seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan tawuran anak-anak muda tidak hanya dilakukan pada malam hari, tapi juga siang hari. Hal ini membuat banyak warga terutama kaum perempuan di kota-kota besar merasa tidak aman dan nyaman untuk berada di luar rumah. Aktivitas mereka menjadi terbatas lantaran bahaya yang mengancam mereka di jalanan.

Dalam video dokumenter pendek berjudul "*The Duterte Effect in The Streets of Manila*" tahun 2016, diceritakan bahwa dapat dikatakan hampir seluruh warga Filipina mungkin pernah menjadi korban tindakan kriminal di jalanan. Beberapa tindakan kriminal dilakukan sambil mengendarakan motor sehingga lahir istilah

“motorcycle crime”. Di tahun 2013, setidaknya terhitung 3000 lebih kasus yang dilaporkan ke kepolisian akibat motorcycle crime ini di Metro Manila. Genigno Druana Jr, kepala PNP Directorate for Operations Law Enforcement Division mengungkapkan lebih dari 3000 kasus tindak kriminal dilakukan oleh para pengendara motor dan dilakukan saat sedang mengendarainya, sehingga pelaku mudah untuk melarikan diri. (Inquirer, 'Riding in tandem' motorcyclists committed over 3000 crimes in Metro Manila in 2013 -police, 2014). Pelaku kriminal sambil mengendarakan motor dengan kecepatan yang tinggi, langsung mencuri barang bawaan orang-orang yang berjalan di jalanan, melukai, dan lalu kabur. “..masalah tindak kriminal yang terjadi banyak dilakukan dengan mengendarai motor, paling tidak selalu ada satu hingga tiga laporan kriminal yang diterima dalam seminggu..” ujar Mari Rodriguez, Kepala Barangay Langing Handa, Quezon City, dalam video dokumenter *“The Duterte Effect in The Streets of Manila.”*

Bentuk kriminalitas yang banyak terjadi di Filipina adalah *street crime* atau kejahatan di jalanan. Kejahatan ini mencakup adanya *motorcycle crime*, dan kejahatan umum lainnya, diantaranya penodongan dengan senjata api di jalan raya yang mana berujung pada pembunuhan, transaksi narkoba atau menggunakan narkoba secara terbuka, pemerkosaan di tempat-tempat sempit dan sepi, penculikan saat berjalan atau dalam perjalanan di mobil, pencopetan di jalan raya dengan mobil vans atau kendaraan yang mirip, mencuri dari mobil yang terparkir, tindakan mengancam, pembunuhan, dan prostitusi (Sanidad-Leones, 2006). Banyaknya aksi

kriminal ini membuat jalanan menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi warga Filipino, padahal jalanan merupakan akses utama masyarakat untuk bekerja dan melakukan banyak aktivitas.

Meskipun pelaku kriminal tidak pandang bulu dengan korban-korban mereka, namun wanita dan anak-anak menjadi target khusus yang lebih di rugikan. Kaum perempuan dan anak-anak sering kali menjadi sasaran empuk tindak kriminal karena anggapan bahwa mereka golongan masyarakat yang lemah. Macam-macam tindakan kriminal yang dapat dialami perempuan dan anak-anak yakni, tindakan pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal bahkan hingga melakukan kontak fisik, pelecehan secara psikologis, perbudakan dan trafficking, pengancaman, tindakan pornografi, dan lainnya (Sanidad-Leones, 2006). Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk tinggal di rumah agar menghindari nasib naas di jalanan. Bahkan, di beberapa wilayah, pemerintah memberlakukan jam malam kepada seluruh warga, khususnya perempuan dan anak-anak agar meminimalisir korban tindakan kejahatan.

Di Cebu, tingkat kriminalitas terhadap perempuan dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat pesat sebesar 20 persen. Kepolisian Daerah Cebu bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, melaporkan adanya 953 kasus kriminalitas terhadap perempuan di tahun 2014 yang kemudian meningkat menjadi 1.276 kasus di tahun berikutnya. Hal ini juga disebabkan karena tingkat pemahaman yang meningkat, perempuan menjadi tahu tindakan apa saja yang termasuk kekerasan dan

pelacehan serta mengetahui kepada siapa mereka harus melapor. Sedangkan untuk anak-anak, tahun 2014 kepolisian daerah Cebu mendapat 573 kasus kekerasan dan meningkat di tahun 2015 menjadi 707 kasus. Hampir sama seperti kekerasan pada perempuan, tindakan yang dialami diantaranya pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, trafficking, abuse, pornografi, dan lainnya. Korban anak-anak berkisar usia 7 hingga 14 tahun.(Philstar, Philstar Cebu-News, 2016).

Dalam skala nasional, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak jauh lebih memprihatinkan. Menurut survey yang dilakukan National Demographic and Health pada tahun 2013, satu dan lima perempuan Filipina sudah pernah mengalami kekerasan fisik sejak umur 15 tahun. Bahkan, 6 persennya sudah mengalami kekerasan seksual.PNP melaporkan, tindakan pemerkosaan menempati ranking ke tiga dari seluruh kasus Violence against Women dari tahun 2004-2012. Kemudian berdasarkan Number of Child Abuse Case yang ditangani DSWD di tahun 2014, mengatakan sebanyak 3,168 gadis di bawah umur 18 tahun mengalami kekerasan dan 131 diantaranya masih bayi berusia kurang dari 12 bulan. DSWD juga mengatakan, sebanyak 1157 perempuan mengalami pelecehan seksual, 448 kasus diantaranya adalah kasus incest. Serta masuk banyak kasus-kasus yang merugikan perempuan dan anak-anak yang tidak dilaporkan (Rappler, Violence against women: Sex, power, abuse, 2015).

Keadaan ini tidaklah berangsur membaik, walaupun pemerintah dibantu kepolisian dan badan-badan lainnya terus mengupayakan strategi untuk menurunkan kriminalitas. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2012-2015), index kriminalitas di Filipina masih mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tabel dibawah dapat diketahui, index kriminal dan indeks keamanan di Filipina selalu pasang surut. Penurunan yang cukup baik terlihat pada tahun 2013 ke 2014, dimana tahun 2013 indeks kriminalitas mencapai angka 54,94 persen turun ke 41,90 persen di tahun 2014. Namun, lagi-lagi angka ini kembali naik di tahun selanjutnya ke angka 43,11 persen (Numbeo, 2015). Diantara negara-negara lain di Asia Tenggara, Filipina merupakan negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dan keamanan yang rendah.

Table 1 Crime Index dan Safety Index Filipina

Tahun	Crime index	Safety Index
2012	53,09	46,91
2013	54,94	45,06
2014	41,90	58,10
2015	43,11	56,89

Source: numbeo.com

Philippines National Police (PNP) dalam mendata tindakan kriminal yang terjadi membaginya kedalam dua indeks. Pertama, indeks kriminal yang diambil dari kriminalitas terhadap perorangan dan properti.Kejahatan yang dimaksud seperti pembunuhan, perampokan, dan lainnya.Kemudian non-indeks kriminal, yang diambil dari segala tindakan kasar atau bullying yang ditunjukkan kepada pelaku kriminal atau korban dan kerusakan yang dilaporkan akibat tindak kriminal (PNP, Philippine National Police 2015 Annual Report, 2015). Dalam laporannya tahun lalu

PNP melaporkan 72,621 kasus diterima untuk tindakan kriminal terhadap perorangan, dengan rincian *killings* sebanyak 9,643 *homicide* sebanyak 2,835 *physical injury* sebanyak 49,845 dan *rape* sebanyak 10,290. Sedangkan untuk tindak kriminal terhadap properti juga menunjukkan penurunan, PNP mendata sebanyak 128,389 kasus yang terdiri dari *robbery* sebanyak 31,741 *theft* sebanyak 82,751 *car-napping* sebanyak 12,900 dan *cattle rustling* sebanyak 997 (PNP, Philippine National Police 2015 Annual Report, 2015).Angka ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, namun tetap saja tindak kriminalitas di Filipina tinggi karena setiap harinya selalu ada laporan kejahatan yang diterima kepolisian.

Angka non-indeks kriminal yang terdiri dari tindakan segala tindakan kasar atau bullying yang ditunjukkan kepada pelaku kriminal atau korban dan kerusakan yang dilaporkan akibat tindak kriminal, mengalami kenaikan yang cukup tinggi.Pada kurun waktu Januari hingga Desember 2014, kasus *homicide* yang dilaporkan kepada PNP sebanyak 4,799, untuk kerusakan properti akibat tindak kriminal sebanyak

126,291 kasus, dan luka fisik sebanyak 75,540 kasus. Angka tersebut naik cukup tinggi pada kurun waktu Januari-Desember tahun berikutnya, dengan laporan *homicide* sebanyak 6.143 kasus, kerusakan properti sebanyak 153,271 serta luka fisik sebanyak 89,512 (PNP, Philippine National Police 2015 Annual Report, 2015).

Keadaan ini tentu saja meresahkan masyarakat Filipino, karena dengan tindak kriminalitas yang tinggi terutama di jalanan ataupun tempat umum, mempersempit ruang masyarakat untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Seorang warga negara tidak seharusnya merasakan perasaan tidak aman dan nyaman di tanah kelahirannya sendiri. Dan sudah menjadu kewajiban bagi pemerintah untuk membuat suasana nyaman tersebut demi warga negaranya. Segala upaya di lakukan pemerintah untuk menurunkan angka kriminalitas, namun hasilnya tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Hingga pada masa Presiden Rodrigo Duterte memimpin Filipina di pertengahan tahun 2016, pemerintah dan kepolisian berhasil menangkap puluhan bahkan ratusan pelaku kriminal dan menurunkan angka kriminalitas secara drastis.

“..tahun ini kami berhasil mengidentifikasi banyak tersangka pengendara motor kriminal yang ternyata hampir semuanya juga merupakan tersangka narkoba..” ujar Mari Rodriguez, Kepala Barangay Langing Handa, Quezon City dalam video dokumenter pendek *“The Duterte Effects in the Street of Manila”*. Terungkap bahwa hampir 80 persen pelaku tindak kriminal yang marak terjadi di jalanan dan tempat umum ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, baik pengguna ataupun Bandar narkoba. Victor Bernardo, Barangay Culiati, Quezon City Chairman, menambahkan,

“..before criminals seemed fearless. Crime after crime. There was no fear of any repercussions or punishments. Illegal drugs are a menace, here in our barangay 80% of our crime incidents are drug related. All who were involved were under the influence of prohibited drugs..”(Pinoy, 2016)

Masalah narkoba merupakan salah satu masalah keamanan nasional yang serius. Negara Filipina telah menjadi pusat dari pembuatan obat-obatan terlarang tersebut di laboratorium-laboratorium yang didirikan secara ilegal, di beberapa wilayah tidak terkecuali Metro Manila. Narkoba tidak hanya berujung pada tindakan kriminal namun juga berkaitan erat dengan eksisnya kelompok-kelompok berbahaya di dalam negeri. Penyalahgunaan narkoba melahirkan tindak kriminal yang berskala jauh lebih besar dan merugikan banyak pihak, seperti money laundering dan penculikan dengan tebusan untuk membebaskan kriminal kelas kakap dari penjara. (Sanidad-Leones, 2006), Apabilahal terus terjadi, stabilitas keamanan negara akan terganggu, warga tidak merasa aman dan mendapatkan perlindungan dengan maraknya aksi kriminalitas yang terjadi, dan terlebih pengedar narkoba banyak menyasar kaum muda Filipino yang berdampak pada masa depan bangsa negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan *Nationalwide Survey on the Nature and Extent of Drug Abuse in the Philippines* tahun 2015, 2,3 persen dari warga Filipina dari usia 10 sampai 96 tahun adalah pengguna narkoba, atau sebanyak 1,8 juta warga. Parahnya, warga Filipina dari usia 10 hingga 96 tahun adalah 75 persen dari keseluruhan warga Filipina pada tahun 2015. Survey ini dihitung secara

individual yang tercatat mulai menggunakan obat-obatan terlarang tersebut sejak 1 Januari 2015 hingga 5 Februari 2016 (Rappler, DDB: Philippines has 1.8 million drug users, 2016). Survey diatas menunjukkan bahwa pengguna narkoba kebanyakan adalah warga yang berusia produktif, warga yang tanpa narkoba dapat membangun negara Filipina menjadi lebih baik. Namun, akibat narkoba, mereka justru melakukan tindak kriminal lain yang membuat mereka berujung di jeruji besi, ataupun tertembak mati dalam operasi kepolisian ataupun oleh oknum bersenjata lain.

Laporan-laporan diatas menandakan bahwa Filipina bukanlah negara yang aman bagi warganya sendiri khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Maraknya tindak kriminalitas membuat warga kehilangan rasa aman dan nyamannya untuk hidup dan beraktivitas seperti biasanya karena adanya rasa takut dan waspada terhadap kejahatan yang bisa saja menyerang mereka tiba-tiba. Apalagi ancaman narkoba yang banyak menasar ke anak-anak muda sudah sangat pelik dan akan menghancurkan generasi bangsa negara. Hal ini tidak dapat dianggap sepele oleh pemerintah sebagai institusi yang mengatur jalannya negara serta menciptakan suasana yang nyaman dan tentram bagi seluruh warganya. “..narkoba mengakibatkan banyak masalah, saat kalian menggunakan narkoba kalian akan melakukan kejahatan terus menerus dan hal ini merusak generasi muda Filipina. Jika narkoba tidak segera di berantas, masa depan Filipina akan menjadi buruk..” ujar Flor Nino Sevilla Palma, seorang warga Filipina sebagai informan, menegaskan tentang pemahaman warga Filipina tentang parahnya masalah narkoba dan setuju dengan kebijakan Duterte. Ia juga menambahkan, semakin banyak warga Filipina yang sadar akan bahaya narkoba

sehingga banyak pengguna narkoba yang memilih untuk menyerahkan diri mereka secara sukarela sebelum ditangkap paksa dalam Oplan Double Barrel.

Pada titik tertentu, masalah narkoba apabila tidak di hentikan secara serius dan tuntas akan berakar pada masalah keamanan negara yang lebih serius. Kekacauan masyarakat tidak dapat dihindari dengan banyaknya komplain dan ketidaknyamanan warga serta kekesalan mereka karena pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan yang seharusnya warga dapatkan. Saat stabilitas terganggu dan pemerintah tidak dapat mengatasi kekacauan ini, intervensi dari pihak luar dengan dalil “bantuan” akan berdatangan dan mencampuri urusan domestik negara tersebut. Namun justru, hal ini menandakan bahwa kedaulatan negara tersebut telah hilang. Negara dianggap tidak mampu mengatasi masalahnya sehingga pihak luar harus ikut campur bahkan secara penuh untuk memperbaiki masalah negara tersebut. Dalam pandangan realis, setiap negara yang masuk ke dalam negara lain dalam konteks memberikan bantuan atau hal lain untuk memperbaiki kestabilan negara tersebut pasti memiliki kepentingannya sendiri. Selalu, kepentingan itu adalah kepentingan yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Apabila hal ini terjadi pada Filipina akibat masalah narkoba yang telah mengakar kuat di lapisan masyarakat, kedaulatan negara sedikit demi sedikit akan menghilang dengan berdatangnya intervensi-intervensi asing yang berusaha mengambil alih pemerintahan Filipina. Akhirnya, negara Filipina akan menjadi negara yang secara tidak sadar sedang terjajah oleh negara ataupun aktor asing lain.

Dengan teori kedaulatan, negara memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan atau arah pemerintahan mereka, tanpa intervensi dari negara atau aktor asing lain. Dengan tetap menjalankan kebijakan War on Drug yang penuh kontroversial ini, Duterte secara tidak langsung menegaskan kepada dunia tentang kedaulatan Filipina. Tentang negaranya masih berdaulat dan memiliki suara dan kekuasaannya sendiri untuk menolak segala bentuk intervensi dari luar dan menjalankan apa yang baik untuk negaranya. Sikap Duterte ini mendapat pujian dan semakin mendapat sanjungan dari warga Filipino, karena setelah sekian lama, akhirnya muncul seorang pemimpin yang berdiri membela rakyatnya di hadapan dunia internasional. Presiden Duterte berani melawan nama-nama besar di dunia internasional seperti United Nationa, Amerika Serikat, dan lainnya untuk menegaskan bahwa kebijakan negaranya adalah urusan negaranya, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Duterte tidak lain untuk kesejahteraan warga Filipino bukannya untuk kepuasan negara asing atau aktor internasional lainnya.

B. Oplan Double Barrel Efektif Menurunkan Peredaran Narkoba di Filipina

PNP Anti-illegal Drugs Campaign Plan-Project “Double Barrel” atau Operation Plan (Oplan) Double Barrel diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016 sebagai loncatan baru dalam menangani masalah narkoba. Kebijakan ini dilaksanakan atas

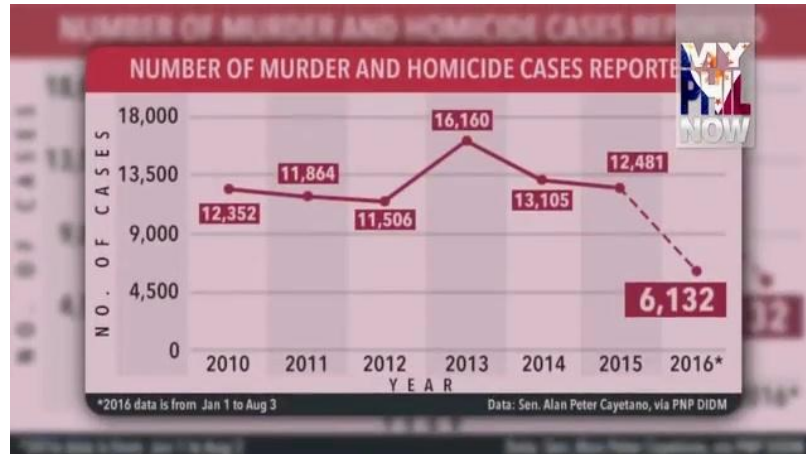
perintah Presiden Duterte untuk menghapus secara tuntas peredaran narkoba di Filipina dalam 6 bulan awal kepemimpinannya (PNP, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel", 2016). Diresmikannya Oplan Double Barrel ini juga menjadi titik awal perubahan negara Filipina dan pandangan internasional terhadapnya.

Belum lama setelah Duterte resmi menjabat sebagai Presiden Filipina di bulan Juli 2016, Kepala Philippine National Police, Dela Rosa memberikan pernyataan mengejutkan tentang angka kriminalitas di Filipina. Setelah diberlakukannya kebijakan War on Drugs di seluruh wilayah Filipina, angka kriminalitas yang terjadi menurun hingga 49 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan angka ini tidak hanya dilihat dari satu wilayah saja, namun hampir di banyak wilayah Filipina mengalami penurunan angka kriminalitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang terjadi di wilayah utara Mindanao, angka kriminal pada bulan Juli 2016 mengalami penurunan sebesar 44 % dibandingkan bulan Juli tahun 2015 dan 2014. Pada Juli 2014 ada sebanyak 3.983 kasus kriminal yang terdata, tahun berikutnya turun menjadi sebanyak 3.171 kasus, dan turun drastis di tahun 2016 menjadi hanya 1,974 kasus (Philstar, PNP chief: Crime rate down 49%, 2016).

Hal ini terjadi karena kepolisian, dengan komando Presiden Duterte, fokus menjalankan Oplan Double Barrel hingga berhasil menjebloskan ribuan Bandar dan pengguna narkoba ke penjara. Hampir 80% pelaku kriminal juga berkaitan dengan narkoba, sehingga saat banyak Bandar dan pengguna narkoba yang tertangkap,

maka berkurang juga tindak kriminal di Filipina. Angka kriminalitas berhasil ditekan dengan kebijakan War on Drug Duterte, sekaligus angka pengguna narkoba.

Table 2 Laporan Kasus Pembunuhan PNP



Source: (Pinoy, 2016)

Tabel di atas memperlihatkan statistik perubahan jumlah kasus pembunuhan yang dilaporkan ke PNP sejak 2010 hingga Agustus 2016. Di mulai tahun 2013, angka tersebut mengalami perubahan meskipun tidak signifikan. Terlihat penurunan yang drastis terjadi pada tahun 2015 ke 2016, yang dalam data ini masih terhitung dari bulan Januari-Agustus. Pada tahun 2015, dilaporkan sebanyak 12.481 kasus pembunuhan yang terjadi, lalu setelah Presiden Duterte mengambil alih istana negara, jumlah kasus pembunuhan menjadi jauh berkurang menjadi 6.132 kasus (Pinoy, 2016).

Media mengabarkan pada 19 September 2016, PNP memaparkan data bahwa 17,759 tersangka narkoba telah ditangkap dalam Oplan Double Barrel. Sedangkan,

715,593 orang menyerahkan diri dalam operasi Project Tokhang. Sebanyak 53,091 dari mereka adalah Bandar narkoba dan sebanyak 662,302 mengaku sebagai pengguna aktif obat-obatan terlarang tersebut. Tersangka yang telah terbunuh secara keseluruhan dari kebijakan War on Drugs Presiden Duterte adalah sebanyak 3000 tersangka. Dengan rincian, 1152 terbunuh dalam operasi polisi dan 1035 karena oknum bersenjata yang tidak diketahui. Benjamin Reyes, kapala DDB mengatakan pemerintah tidak main-main dalam menjalankan kebijakan War on Drugs Duterte dan pemerintah sedang melakukan yang terbaik untuk memberantas narkoba di negaranya, dengan harapan, Filipina dapat benar-benar bersih dari narkoba setelah Duterte paripurna tugas. *“We are hoping at the end of the Duterte administration, illegal drugs will become non-issue..”* ujar Reyes. (Rappler, DDB: Philippines has 1.8 million drug users, 2016)

Laporan tahunan PNP 2016 merilis 3 tindak kriminal yang paling sering dilaporkan adalah pencurian, kekerasan fisik, dan perampokan. Angka ketiga tindak kriminal tersebut berkurang hampir setengahnya dalam satu tahun terakhir. PNP membandingkan jumlah laporan yang diterima selama Januari-Desember tahun 2015 dan 2016. Untuk kasus pencurian, pada tahun 2015 berjumlah 82,751 menjadi 49.613 di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada kasus kekerasan fisik dan perampokan. Kekerasan fisik berkurang dari 49,845 menjadi 35,796, lalu perampokan berkurang dari 31.741 menjadi 21.217 (PNP, Annual Report , 2016).Hal

ini kembali menandakan keberhasilan Oplan Double Barrel dalam emeringkus pelaku kriminal yang kebanyakan adalah Bandar atau pengguna narkoba.

“Filipina sekarang terasa lebih aman dari tindakan pencurian barang, mobil, kekerasan, perampokan, dan pemerkosaan” pernyataan ini berasal dari Martin Andanar, *Presidential Communications Secretary* saat PNP merilis indeks kriminal yang menunjukkan penurunan. Indeks kriminal, yang termasuk tindakan pembunuhan, kekerasan fisik, pemerkosaan, perampokan, pencurian, dan lainnya, turun sebanyak 31,67% dari kurun waktu Juli-November 2015 hingga Juli-November tahun 2016. Data menunjukkan bahwa kriminalitas terhadap properti menurun sebanyak 42,48 % dan kriminalitas terhadap seseorang menurun hingga 12,25%. Secara keseluruhan, kriminalitas terus mengalami penurunan sejak Presiden Duterte resmi menjabat jabatannya (PCO, 2016).

Dalam kurun waktu 6 bulan masa awal kepresidenan Duterte, yakni Juli hingga akhir tahun 2016, telah tewas sebanyak 6.216 orang yang terdiri dari 2.167 tersangka narkoba tewas akibat operasi kepolisian dan 4.049 lainnya karena oknum tidak dikenal yang masih dalam proses investigasi polisi. Sebanyak 74.916 bandar dan 932.237 pengguna narkoba menyerahkan diri ke polisi terhitung hingga tanggal 31 Desember (Rappler, Duterte's war on drugs: the first 6 months , 2017). Angka ini pun semakin meningkat hingga 30 Januari lalu mejadi 79.341 bandar dan 1.098.883 pengguna narkoba menyerahkan diri. PNP sendiri telah mengunjungi 7.031.394 rumah dalam operasi Oplan Tokhang (Philstar, Double Barrel reloaded, 2017).

Berdasarkan laporan tahunan PNP tahun 2016, total akhir Bandar dan pengguna narkoba yang tertangkap polisi dalam Oplan Double Barrel menjadi 1.143.896 jiwa dari seluruh wilayah Filipina. Sebanyak 47,922 orang ditangkap, 2.363 terbunuh dalam operasi polisi. Dalam Project HVT, sebanyak 388 orang menyerahkan diri, 126 orang ditangkap, dan 25 terbunuh. Satu juta lebih Bandar dan pengguna Narkoba dapat diringkus oleh kepolisian merupakan angka yang sangat tinggi. Mengingat di tahun sebelumnya, yakni 2015, PNP hanya berhasil menangkap 42.700 bandar dan pengguna narkoba melalui program *Campaign Againsts Illegal Drugs* (PNP, Annual Report, 2015).

Peredaran narkoba tidak hanya berkuat pada warga sipil, namun beberapa pejabat daerah dan bahkan kepolisian pun juga terlibat. Maka dari itu, Duterte tidak membuat Oplan Double Barrel hanya bertarget kepada warga sipil, namun ke seluruh lapisan masyarakat tidak peduli dengan jabatan, kekayaan, dan pengaruh yang ia miliki di Filipina. Dalam laporan tahunannya juga, PNP melaporkan upaya pembersihan internal kepolisian dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang terlibat masalah narkoba. Sebanyak 1130 nama orang-orang penting masuk ke dalam watch list Direktorat Intelgen, 17 orang mendapat hukuman administratif dan 13 mendapat hukuman kriminal. Sebanyak 21 jiwa terbunuh, 50 ditangkap, 43 orang menyerahkan diri dibawah perintah langsung Duterte, dan 12 orang menyerahkan diri secara sukarela (PNP, Annual Report , 2016). Presiden Duterte tidak pandang bulu

dalam menangkap orang-orang terdekat atau pemerintahan yang terkait dengan narkoba.

Kematian yang diakibatkan oleh operasi anti-narkoba secara tidak langsung menimbulkan muncul oknum-oknum bersenjata yang ikut melakukan pembunuhan. Kepolisianpun juga berupaya untuk menginvestigasi kasus-kasus tersebut dan segera menangkap pelakunya. Berdasar data rekapitulasi dari Phillipine Freedom of Infonation (FOI), hasil Oplan Tokhang yang dilakukan sejak 1 Juli 2016 hingga 29 Januari 2017, kematian yang dilaporkan berjumlah 3,930 kasus, diantaranya warga sipil, pegawai pemerintahan, tentara negara, polisi, dan lainnya. Hingga 29 Januari 2017, kepolisian berhasil menyelesaikan 1.184 kasus dan menangkap pelaku-pelaku pembunuhan tersebut(FOI, 2017).

Presiden Duterte berhasil mempengaruhi orang-orang pemerintahan, kepolisian, dan juga militer untuk bersama-sama berkomitmen memberantas tuntas narkoba. Sehingga semakin banyak orang yang berbalik mendukung dan turut membantu kebijakan War on Drug ini agar terus berjalan. Dela Rosa, kepala PNP mengatakan bahwa kepolisian tidak boleh gagal dalam melakukan kampanye anti-narkoba (Oplan Double Barrel) ini demi membangun negara Filipina yang jauh lebih baik untuk generasi penerusnya dapat hidup tanpa ada masalah narkoba.

Dengan bukti menurunnya angka narkoba dan kriminalitas, otomatis situasi dan kondisi di Filipina dapat lebih terkendali. Jalanan tidak lagi menjadi tempat yang

menyeramkan dan membahayakan bagi warga Filipin. Kaum perempuan dapat bebas melakukan aktivitasnya di luar rumah tanpa takut ada seseorang yang merampoknya atau melukainya. Tidak hanya perempuan, seluruh warga Filipina tidak takut lagi untuk pergi ke luar rumah pada malam hari. Tindakan kriminal di jalanan berkurang drastis akibat dimulainya Oplan Double Barrel oleh kepolisian. Beberapa pengguna narkoba atau Bandar juga berbondong-bondong menyerahkan diri sebelum tertangkap lewat operasi tersebut. Menandakan bahwa Oplan Double Barrel efektif dalam memberantas narkoba sekaligus menurunkan angka kriminalitas di Filipina, yang mana kedua hal ini adalah prioritas utama Duterte dalam masa kepresidenannya sekarang.

Enam bulan bukan waktu yang cukup bagi suatu negara untuk memberantas narkoba di seluruh pelosok negaranya. Namun, tetap saja, Oplan Double Barrel mencetak prestasi yang membanggakan dalam upaya memberantas narkoba sekaligus kriminalitas. Enam bulan bukan waktu yang singkat namun dengan komando Duterte, kepolisian berhasil menjebloskan ribuan Bandar dan pengguna narkoba ke sel penjara, bahkan ada yang menyerahkan diri terlebih dulu. Melihat hasil ini, tidak aneh apabila Duterte terus memberlakukan kebijakan War on Drugs nya, walaupun selain ribuan tersangka yang tertangkap, ribuan pula tersangka yang mati di tempat akibat kebijakan ini. Hal tersebut yang memicu protes dan kecaman yang melayang dari aktor-aktor internasional kepada Presiden Duterte. Organisasi-Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan seperti Amnesty International,

United Nation on Human Rights (UNHR), Human Rights Watch (HRW), dan media internasional kerap merilis laporan atau artikel yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan Duterte ini.

Kebijakan Duterte dianggap melanggar nilai-nilai dasar hak asasi manusia, memicu munculnya kembali fenomena ekstrajudisial killings atau pembunuhan di luar hukum, dan lainnya. Internasional juga mengatakan bahwa pembunuhan tidak dapat dibenarkan sebagai upaya pemberantasan narkoba. Ia telah melanggar banyak perjanjian-perjanjian internasional yang sudah disepakati bersama, dan bahkan Oplan Double Barrel dinilai telah melanggar International Drug Conventions. Pihak internasional kemudian memberikan solusi untuk Duterte yakni melakukan pemberantasan narkoba dengan pendekatan human rights. Namun, bukan Duterte namanya jika tidak melawan balik semua kritik dan kecaman tersebut. Duterte beranggapan bahwa solusi yang aktor internasional tawarkan tidak akan efektif apabila diterapkan di negaranya. Narkoba telah dan akan terus merusak generasi muda Filipina, apabila tidak segera dihentikan, masa depan Filipina pun akan semakin memburuk.

Pada pidato Presiden Duterte di Cebu awal bulan lalu, ia mengatakan pendapatnya tentang tuduhan pelanggaran human rights yang dilakukannya karena membunuh ribuan tersangka Bandar narkoba tanpa melalui proses hukum yang benar. Duterte mengatakan kepada masyarakat untuk membedakan perbedaan membunuh orang-orang tidak bersalah dengan membunuh para kriminal. Ia menambahkan juga

bahwa Duterte akan lebih memilih membunuh para kriminal narkoba tersebut dengan tangannya daripada melihat masa depan dan ast negara, yakni generasi mudanya terampas oleh narkoba (ABS-CBN, 2017). Menurut Duterte, tidak ada yang salah dalam membunuh para kriminal tersebut karena mereka merugikan orang lain dan jika tidak diberantas akan memperparah keadaan di Filipina.

Masih dengan persoalan pelanggaran human rights, kebijakan War on Drug Duterte yang disebut tindakan terhadap kemanusiaan tidak dianggap sebagai masalah serius. Walaupun terus menerus mendapat tekanan soal *human rights* membuat Duterte geram, karena faktanya dunia internasional tidak jelas dalam memaknai *human rights*, terutama dalam prakteknya. Pada Agustus 2016, Duterte mengatakan. “*..crime against humanity? In the first place, I'd like to be frank with you. Are you humans? What is your definition of human being?...Human rights? Use it in the right context if you have the brains*” ujar Duterte kepada para tentara saat kunjungan ke kamp-kamp(Philstar, Duterte officials hold drug suspects, criminals not human, 2017). *Human rights* tidak bisa menjadi pelindung bagi para kriminal yang telah merugikan banyak pihak untuk lolos dari hukuman. Ada banyak permasalahan *human rights* di Filipina, namun mengapa isu ini muncul hanya saat Oplan Double Barrel mendapatkan korban jiwa dalam operasinya.

Sejak masa kampanye hingga resmi menjadi Presiden Filipina ke-16, Duterte tetap konsisten menyuarkan prioritasnya untuk memberantas narkoba hingga tuntas di negaranya. Sering kali Duterte mengatakan akan meminta polisi untuk tidak ragu-

ragu membunuh warganya jika mereka terbukti menggunakan atau memperjualkan narkoba. *“When I become president, I will order the police to find those people (dealing or using drugs) and kill them. The funeral parlors will be packed..”* ujar Duterte, pada saat kampanye Presiden di tanggal 15 Maret 2016. Di lain kesempatan, Duterte mengatakan dirinya sendirilah yang akan membunuh para Bandar dan pengguna narkoba, *“If you are still into drugs, I am going to kill you. Don’t take this as a joke. I’m not trying to make you laugh. Sons of bitches, I’ll really kill you”* orasi Duterte saat berada di kampung halamannya, kota Davao tanggal 4 Juni 2016.

Selain terang-terangan mengatakan akan membunuh para Bandar dan pengguna narkoba, Duterte juga mengutarakan ketidakpeduliannya pada hak asasi manusia, khususnya hak-hak yang dimiliki para Bandar dan pengguna. *“My order is shot to kill you. I don’t care about human rights, you better believe me..”* pada tanggal 6 Agustus 2016. Narkoba bukanlah masalah yang sepele dan kerugian yang ditimbulkan adalah rusaknya masa depan generasi muda suatu bangsa. Menurut Duterte, Bandar dan pengguna narkoba tidak berhak mendapatkan hak-hak mereka karena mereka telah merampas hak-hak orang lain, dengan mencuri, membunuh, memperkosa, menyebarkan pengaruh narkoba. Sehingga, tidak salah untuk membunuh para Bandar dan pengguna jika diperlukan untuk menghapus narkoba secara tuntas di Filipina.

Pilihan Duterte untuk mengabaikan protes, kritik, serta ancaman dari internasional menjadi pilihan yang rasional melihat bagaimana Oplan Double Barrel

berhasil menurunkan tingkat peredaran narkoba serta kriminal di Filipina. Dalam teori pilihan rasional, seorang individu dalam memilih pilihannya harus menimbang apa yang menjadi keuntungan dan kerugiannya. Dampak apa yang akan timbul akibat pilihan yang ia ambil, dan apakah dampak tersebut menguntungkan atau tidak. Menurut Duterte, kebijakannya yang kontroversial ini lebih menguntungkan Filipina, sehingga ia tetap meneruskan War on Drugs hingga negaranya bersih dari narkoba. Selain itu, Duterte menganggap bahwa solusi –solusi yang ditawarkan internasional dan negara-negara adidaya, yakni pemberantasan narkoba melalui pendekatan human rights, tidaklah efisien dan efektif untuk menuntaskan secara bersih narkoba.

Kepemimpinan Duterte pada masa kepemimpinannya sebagai Walikota Davao berhasil melahirkan sebuah perubahan sosial, yang dalam hal ini adalah perubahan pola pikir, perilaku, serta kebiasaan masyarakat Davao. Duterte dalam kepemimpinannya selalu menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, anti diskriminatif terhadap setiap golongan individu, dan anti-narkoba serta aksi kriminal. Adanya Davao Death Squad membuat para pelaku tindak kriminal mendapat hukuman tanpa melalui proses hukum yang benar, namun kelompok ini juga secara tidak langsung menimbulkan pemikiran bagi orang lain untuk tidak saling melukai, tidak saling merugikan, dan hidup berdamai demi kenyamanan bersama. Hal itulah yang menjadikan Davao saat ini berubah 180 derajat dari kota yang sangat menyeramkan dengan tindakan kriminalitas dimana-mana, menjadi kota yang aman dan nyaman di negara Filipina. Duterte terbukti tidak hanya mengatasi permasalahan kriminalitas

dan narkoba di Davao, tapi membangun Davao menjadi kota yang lebih baik dan kesejahteraan warga Davao adalah yang terpenting.

Hal ini juga lah yang ingin di lakukan Duterte pada Filipina secara negara besar. Kriminalitas yang terjadi di Davao adalah gambaran sebagian kecil aksi kriminalitas di negara Filipina. Maka dari itu, menurut Duterte, tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah ini jika tidak dengan tegas dan keras. Kebijakan War on Drugs bagi masyarakat internasional mungkin terlihat menyeramkan dan tidak masuk di akal. Namun, berdasarkan jejak rekam Duterte sebagai Walikota Davao bertahun-tahun, cara yang serupa berhasil mengubah wajah Davao menjadi kota yang aman dalam beberapa dekade. Negara Filipina yang berubah menjadi negara yang aman dan nyaman, masyarakat yang tidak saling mendiskriminasi dan saling menghormati hak-haknya satu sama lain, tentu tidak akan hanya menjadi angan-angan semata.

Masyarakat Filipino merasa percaya dan bangga memiliki Duterte sebagai Presiden mereka karena Filipino bangga memiliki presiden yang berani berdiri melawan dunia untuk warganya. Duterte berani melawan negara-negara besar dan organisasi internasional yang memiliki pengaruh luas di dunia politik internasional, menyuarakan suara kebijakannya yang berpihak pada warga Filipino. Bahkan, Duterte melarang asing untuk ikut campur dalam kebijakan-kebijakan dalam negeri yang ia berlakukan. Secara langsung Duterte seakan mengatakan bahwa "*our policy is our business*" dan tidak ada sangkut pautnya dengan negara lain apalagi badan-

badan internasional. Keberanian, ketegasan, serta visi Duterte untuk membangun kembali Filipina menjadi negara yang lebih baik membuat masyarakat Filipino semakin mencintainya dan mendukungnya.

Terjadi desentralisasi antara wilayah metropolitan Manila dengan wilayah-wilayah lain. Ibu kota Manila menjadi sentral dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, di wilayah lain, tidak berkembang dengan baik. Duterte sangat tidak setuju dengan apa yang terjadi dengan Filipina sekarang, dimana keadaan politik ekonomi yang lebih menguntungkan kaum-kaum borjuis ketimbang masyarakat Filipino sendiri. Duterte berhasil meyakinkan warga Filipino untuk percaya padanya bahwa ia akan membawa perubahan untuk Filipina yang lebih baik, perubahan terutama pada kondisi sosial ekonomi politik, yang dimulai dari pemberantasan narkoba terlebih dulu. Karena narkoba merupakan sumber masalah dari semua masalah. Seorang pengguna akan cenderung melakukan macam tindakan kriminal, transaksi narkoba pun tidak hanya terjadi di masyarakat kalangan menengah kebawah, namun para pengusaha dan pejabat pun juga melakukan hal sama, yang berujung pada korupsi, merugikan lebih banyak pihak lagi.

Pilihan Presiden Duterte untuk meneruskan kebijakan War on Drugs nya di Filipina meskipun mendapat kecaman dari banyak aktor internasional karena melanggar Hak Asasi Manusia dan alasan lainnya, merupakan pilihan yang rasional bagi Duterte demi warga Filipino dan negaranya. Narkoba banyak menjangkit anak-anak muda, apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, Filipina akan memiliki

masa depan yang lebih menyeramkan, karena generasi muda mereka telah dirusak oleh narkoba. Kemudian, Oplan Double Barrel terbukti efektif dalam menurunkan angka Bandar dan pengguna narkoba sekaligus menurunkan tingkat kriminalitas. Angka kriminalitas dan penggunaan narkoba menurun drastik dan secara kasat mata, jalan-jalan di kota besar seperti di Metro Manila menjadi lebih nyaman. Warga tidak lagi merasa takut untuk pergi keluar rumah di malam hari dan merasa tidak nyaman karena bisa sewaktu-waktu menjadi korban aksi kriminal. Hal ini semakin membuktikan bahwa Oplan Double Barrel efektif menciptakan suasana negara yang lebih aman dan nyaman bagi warganya.